

## ABSTRAKSI

Reformasi, tentu saja dikaitkan dengan usaha untuk melakukan perubahan manajemen kehidupan politik, pemerintahan yang lebih demokratis, guna menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, berwibawa, jujur, adil, berbudaya dan beradab (Masyarakat Madani), bersih dari unsur dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Melakukan perubahan tidak terlepas dari tujuan dibentuknya pemerintahan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik). Karena pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat.

Peranan birokrasi adalah suatu hal yang tak dapat dihindarkan dalam pembangunan. Peningkatan pelayanan masyarakat salah satunya tergantung dari keinginan sikap dan perilaku aparatur/birokrasi pemerintah sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan program atau kebijaksanaan pemerintah.

Dalam konteks penelitian ini, dari hasil temuan dilapangan di Kecamatan Singingi bahwa tingkat perilaku birokrasi pemerintahan dalam melayani publik dapat dikatakan masih kurang baik dilaksanakan antara lain kurang ditetapkannya secara menyeluruh nilai-nilai demokrasi dengan mengembangkan partisipasi aktif masyarakat bersama-sama birokrasi dalam melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu perlu ditingkatkan kinerja aparatur birokrasi pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Disamping itu perlu ditingkatkan komunikasi dua arah (two way communication) antara birokrasi pemerintahan dengan masyarakat sehingga terwujud pembangunan yang partisipatif.

